

# Inovasi Pembiayaan Pembangunan Ekonomi Biru Melalui Upaya Proteksi-Produksi Menuju Indonesia Emas 2045

Meizani Irmadhiany  
Executive Chair, Konservasi Indonesia

### Mengapa?

1. Visi pertumbuhan ekonomi secara holistik.
2. Harmonisasi: kesejahteraan ekonomi, kesetaraan sosial, & keberlanjutan lingkungan.
3. Solusi bagi ketimpangan & ketidakberlanjutan
4. Area untuk aplikasi "Internet of things"
5. Nilai tambah tinggi
6. Pelibatan IPLC, minoritas, displaced people

Ekonomi biru adalah rancangan optimalisasi sumberdaya perairan (khususnya laut) yang bertujuan untuk peningkatan pertumbuhan ekonomi melalui berbagai kegiatan yang inovatif dan kreatif dengan tetap menjamin usaha dan kelestarian lingkungan

Ekonomi Biru:  
New Global  
Economy  
Mainstream

# POTENSI EKONOMI BIRU INDONESIA



## Ekosistem Pesisir & Laut



### Terumbu Karang

> **590 spesies;**  
75% keanekaragaman karang global



### Mangrove

**3,31 juta ha;**  
20% mangrove di dunia



### Lamun

**13 spesies;**  
estimasi luasan **3 juta ha**

## Kontribusi Ekonomi



### Perikanan

Produsen **ke-2 terbesar di dunia**,  
berkontribusi sebesar  
**US\$ 27 miliar** ke PDB nasional



### Pariwisata

Berkontribusi **US\$ 26 Miliar** ke  
perekonomian nasional dari wisata  
pesisir dan laut

# CELAH PEMBIAYAAN SEKTOR EKONOMI BIRU

Saat ini, kontribusi sektor ekonomi biru terhadap PDB Indonesia rata-rata **3,6%**.  
Hingga tahun 2045, diharapkan kontribusi sektor ekonomi biru sebesar **12,45%**.

Simulasi menghitung investasi yang dibutuhkan untuk mencapai target 7% dan 12,45% dari PDB nasional pada tahun 2045.

Skenario laju degradasi sumberdaya (%) per tahun	Rata-rata investasi tahunan (IDR Triliun)	
	7%	12,45%
0%	3,64	1.928,90
1,5%	788,35	2.708,51
3%	1.392,22	3.307,21



Rata-rata investasi tahunan yang dibutuhkan berkisar antara **Rp 3,64 triliun hingga Rp 3.307,21 triliun per tahun.**

# SEKTOR PRIORITAS EKONOMI BIRU - BAPPENAS



## Industri yang Telah Mapan (*Established*)

1. Perikanan tangkap dan budidaya
2. Sektor manufaktur berbasis kelautan
3. Perdagangan, Transportasi, dan Logistik Kelautan
4. Wisata

## Industri yang Berkembang (*Emerging*)

1. Energi terbarukan
2. Bioteknologi dan Bioekonomi
3. Riset dan Pendidikan
4. Konservasi kelautan dan jasa ekosistem

# SEKTOR PRIORITAS EKONOMI BIRU – Kemenko Marves & UNDP



1. Pengelolaan  
limbah

2. Konservasi  
ekosistem dan upaya  
restorasinya

3. Perikanan &  
budidaya  
berkelanjutan

4. Energi terbarukan

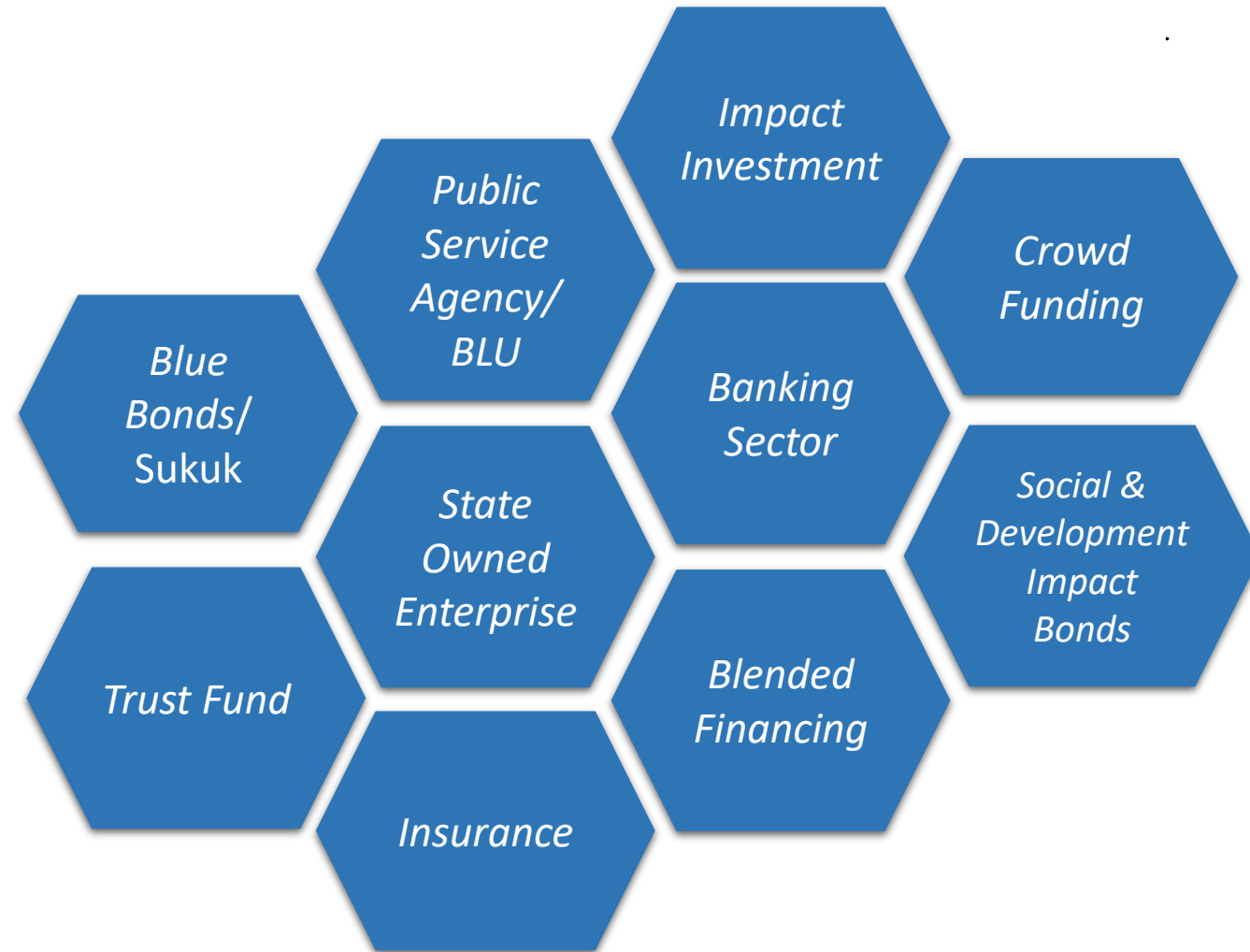
5. Pengelolaan  
bencana dan  
pengurangan resiko

6. Bioteknologi  
kelautan

7. Ekowisata

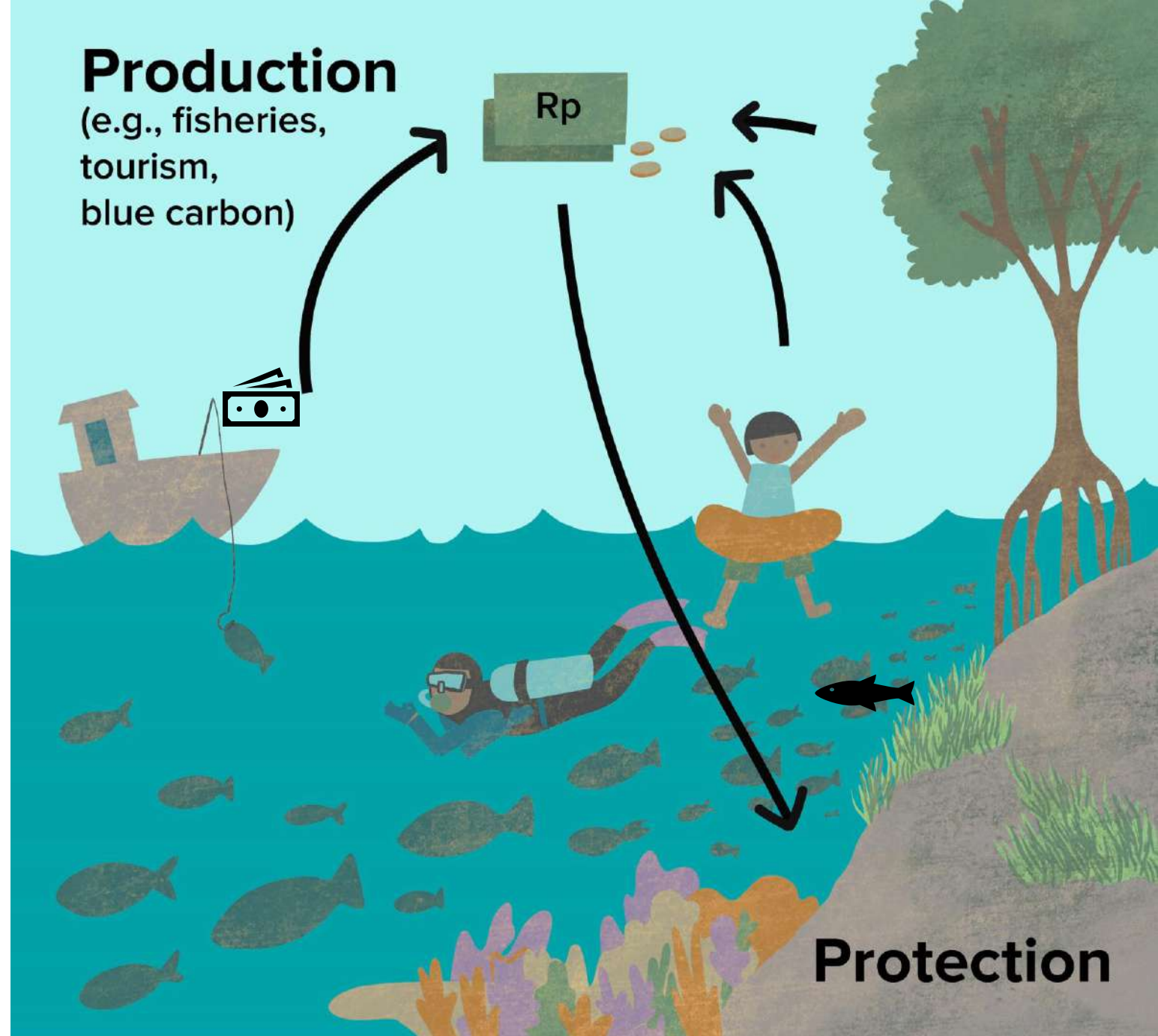
8. Teknologi kelautan

# INSTRUMEN PEMBIAYAAN SEKTOR EKONOMI BIRU



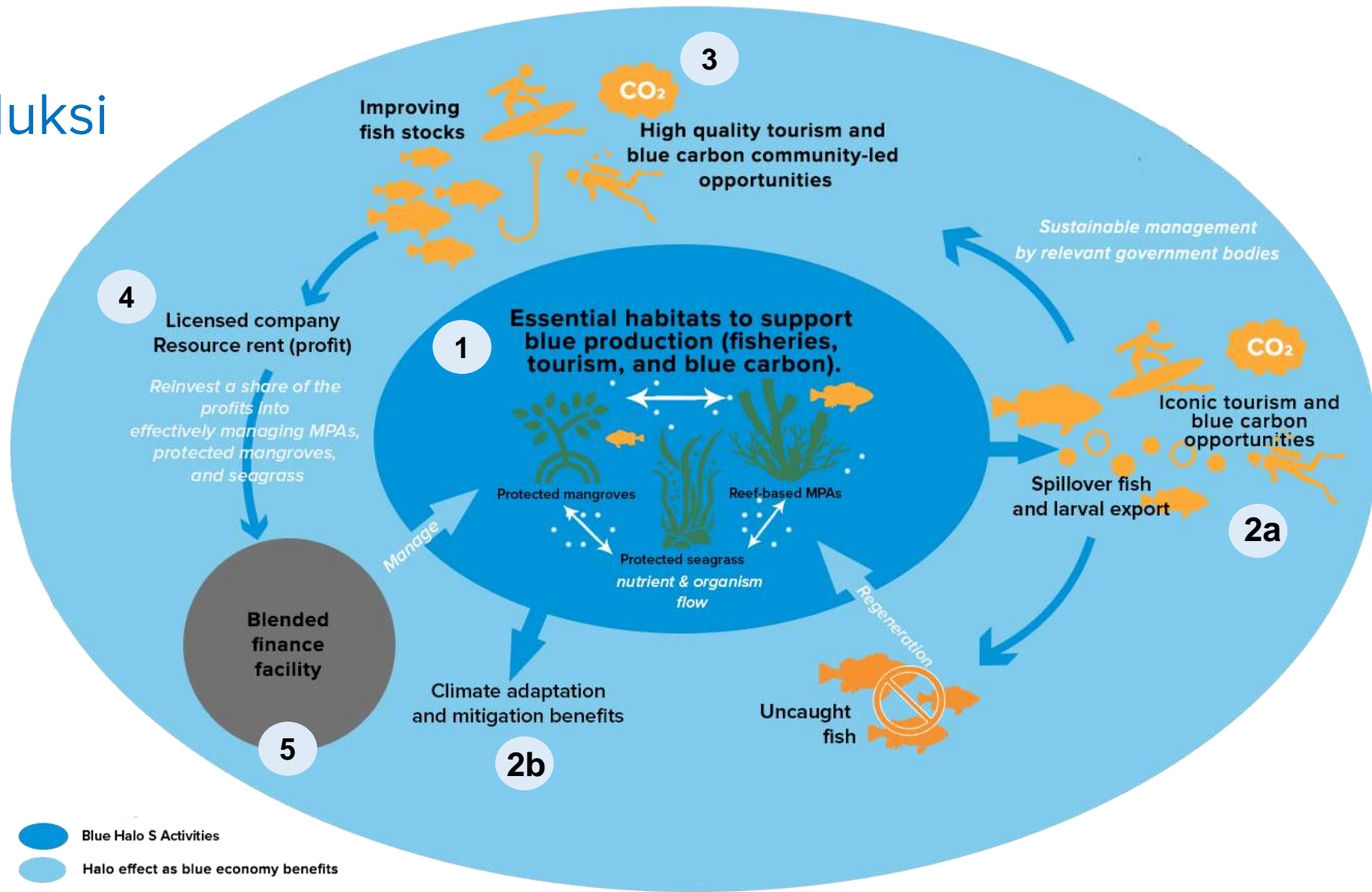
# Blue Halo S

sebagai salah satu inovasi pembiayaan sektor ekonomi biru



# Blue Halo S

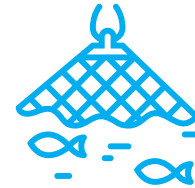
adalah upaya  
Proteksi - Produksi



# BLUE HALO S MENDUKUNG 5 AGENDA PRIORITAS KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN (KKP) TERKAIT PEMBANGUNAN EKONOMI BIRU



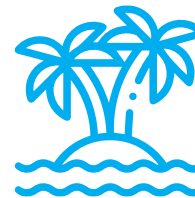
Perluasan Kawasan  
Konservasi “MPA  
Vision 30x45”



Penangkapan  
Ikan Terukur



Budidaya Laut  
Berkelanjutan



Pengelolaan  
Kawasan Pesisir &  
Pulau-pulau Kecil

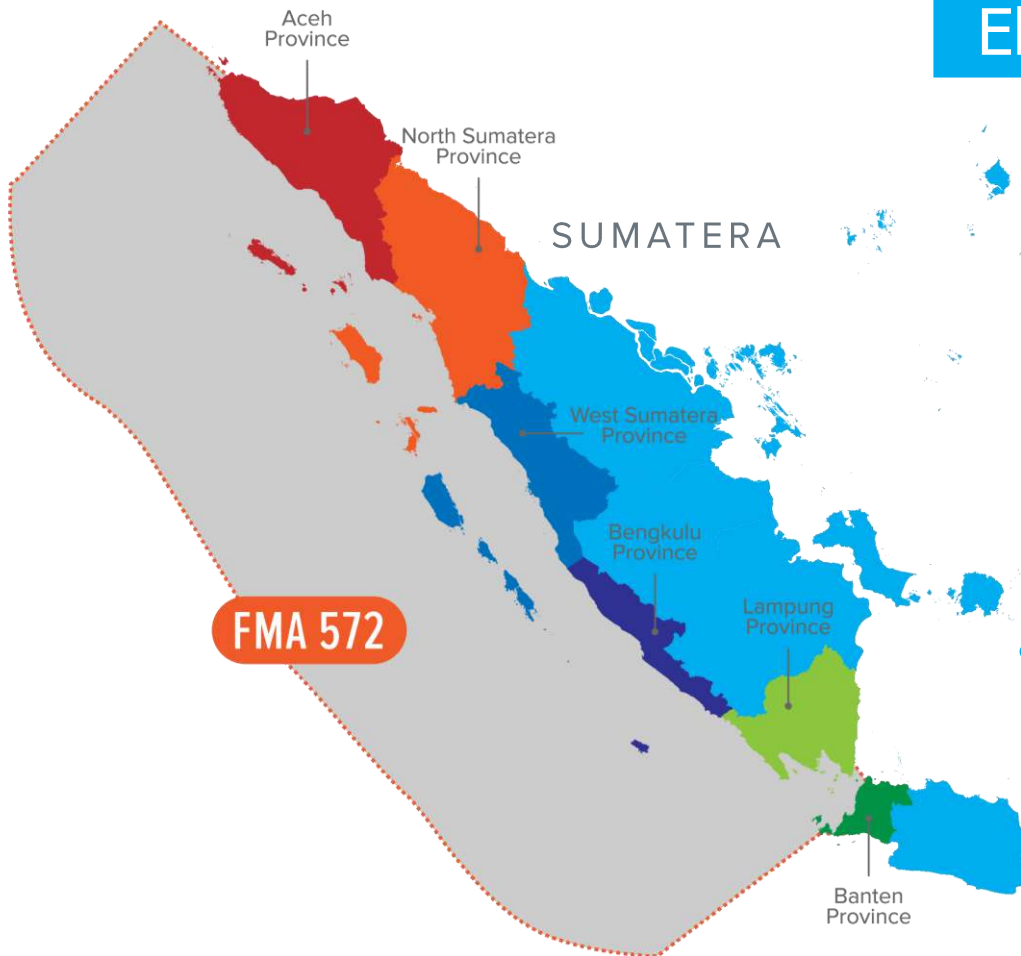


Pengelolaan  
Sampah Plastik



# Pilot di WPP 572 (Wilayah Barat Sumatra)

# WILAYAH PENGELOLAAN PERIKANAN (WPP) 572 EKOSISTEM DAN POTENSI EKONOMINYA



## Ekosistem pesisir & laut



Terumbu Karang  
**125.000 ha**



Mangrove  
**48.000 ha**



Lamun  
**168.000 ha**

## Kontribusi Ekonomi

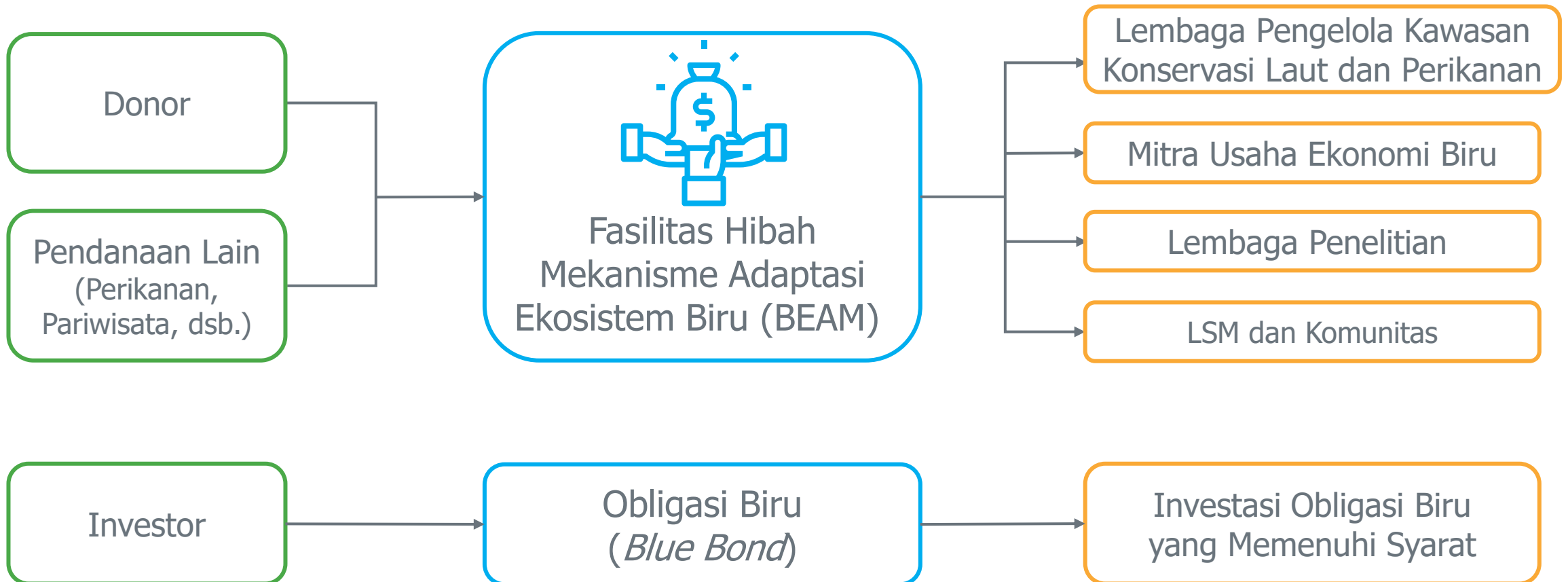


Rata-rata produksi perikanan **830.000 ton** per tahun

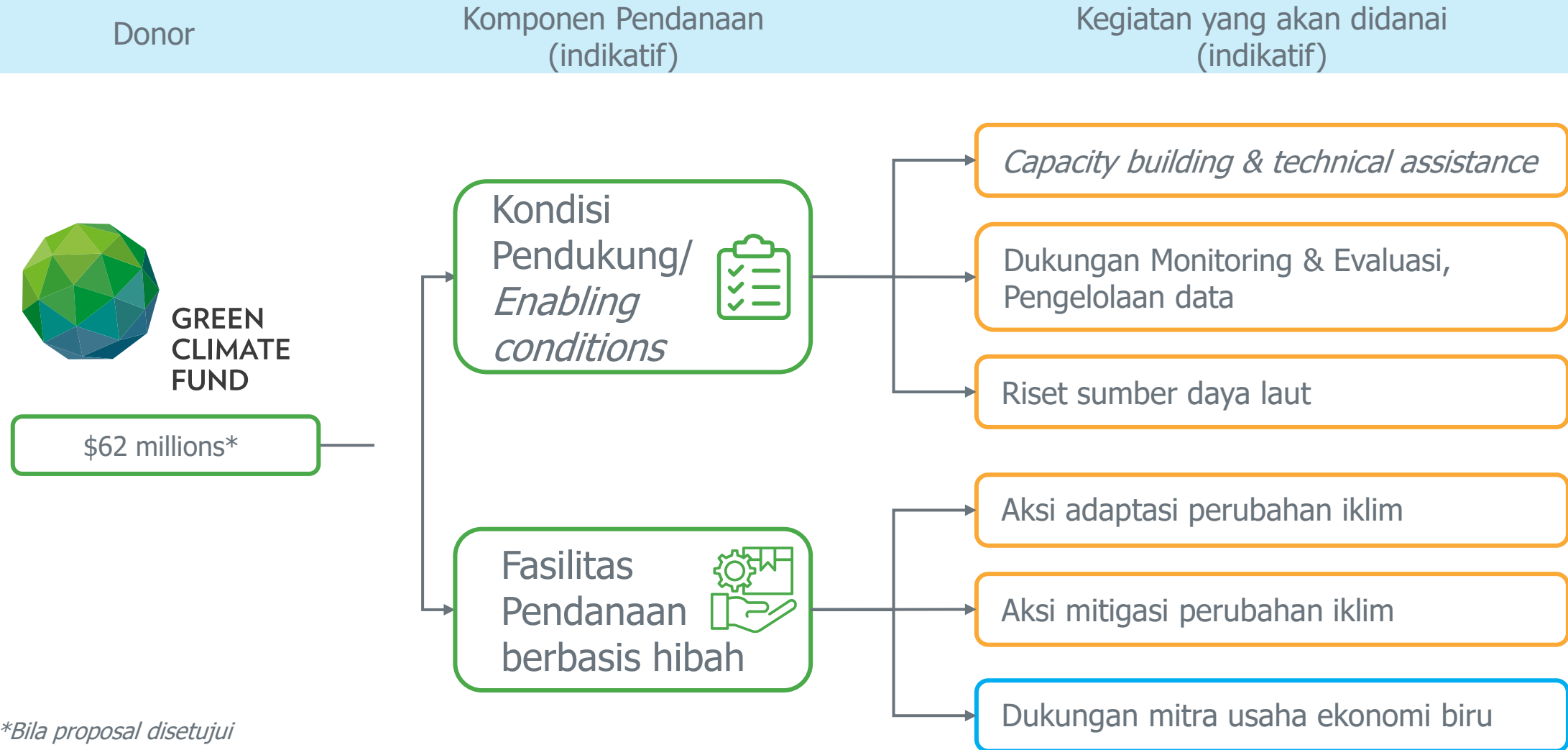


**194 unit** industry pengolahan perikanan (mis., tuna, kepiting, udang, rumput laut)

# SKEMA PENDANAAN BLUE HALO S



# DESAIN FASILITAS HIBAH BEAM – BLUE HALO S



\*Bila proposal disetujui

# HASIL KAJIAN AWAL POTENSI PEMBIAYAAN - BLUE FINANCE/BONDS

Lebih dari 80 potensial pelaku usaha ekonomi biru teridentifikasi di WPP 572



Pariwisata berkelanjutan



Riset kelautan



Pangan



Perdagangan, transportasi, & logistik



Energi terbarukan



# CONTOH PEMBIAYAAN KAWASAN KONSERVASI DI RAJA AMPAT



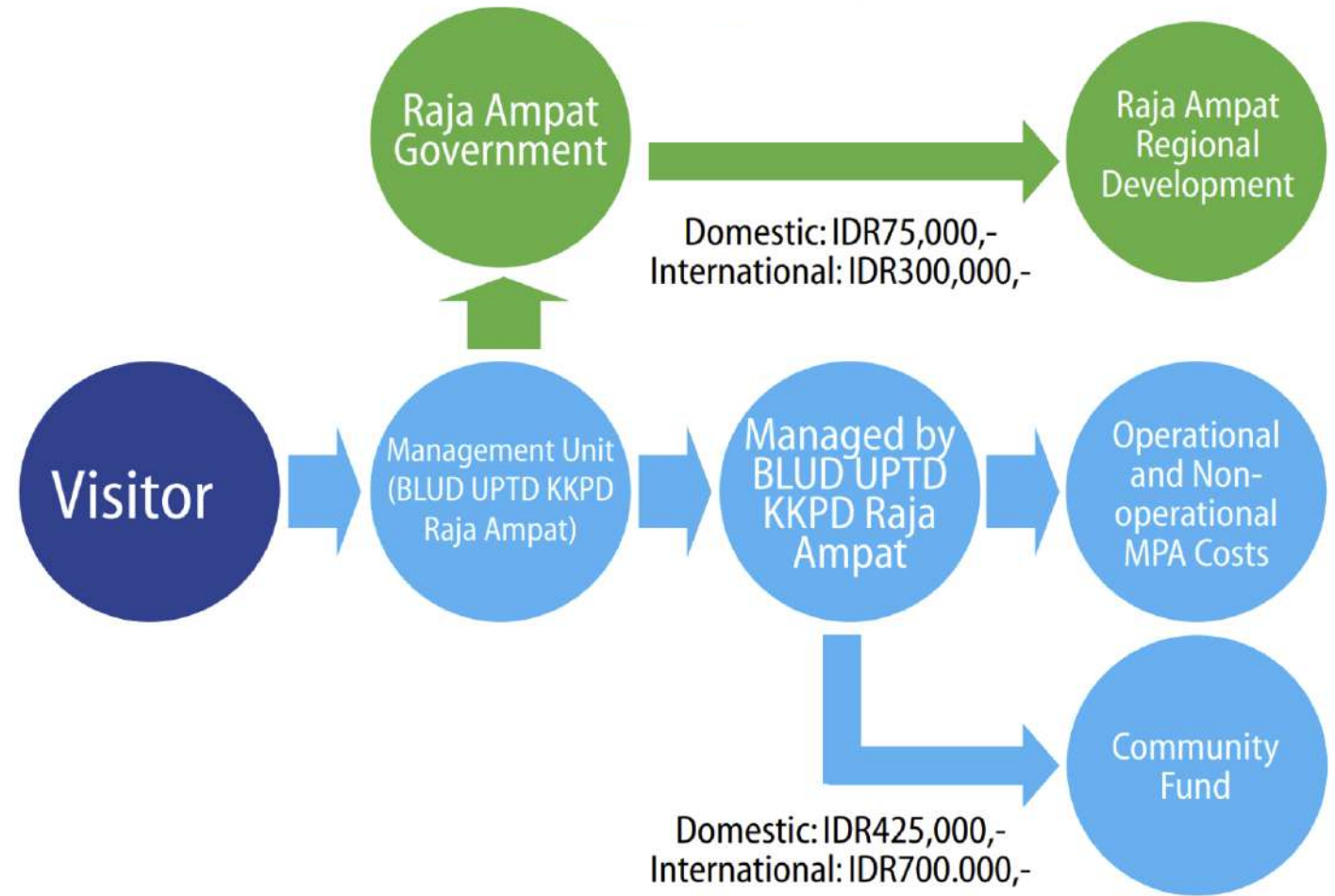
## Environmental Service Fee

In 2014, the Raja Ampat Environmental Service Fee was introduced to generate the significant funding needed to effectively manage Raja Ampat's Marine Protected Areas (MPAs). Proceeds from the environmental service fee are used for all the operational aspect needed for MPAs (patrolling, community outreach, biological monitoring, etc.), and the sustainable development of local communities.

Keep proof of purchase of Environmental Service Fee on you at all times to show the officers from the management unit during random patrol checks. The entrance permit is valid for 12 months from the date of purchase.

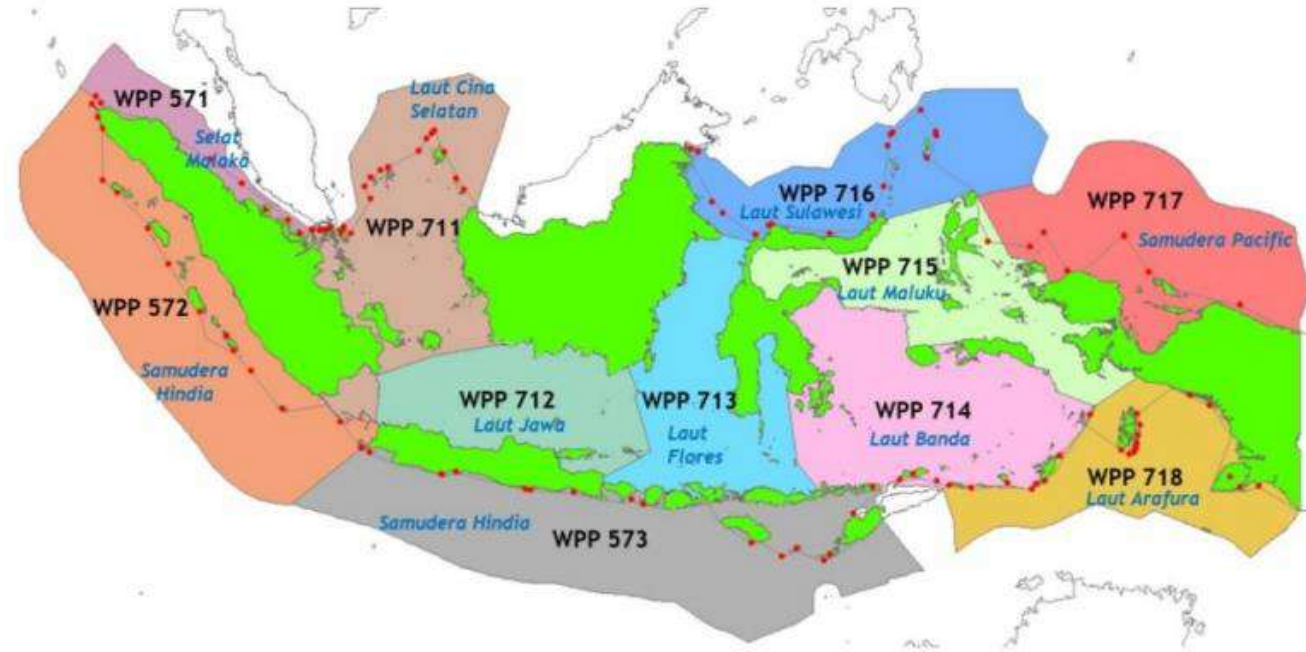
- International Visitor's Fee: IDR1,000,000
- Domestic Visitor's Fee: IDR500,000

**Raja Ampat Marine Protected Area Management Unit (BLUD UPTD KKP Raja Ampat)**  
Contact Number: +62-811-4852033  
E-mail: info.blud.uptdr4@gmail.com  
Website: www.kkpr4.net



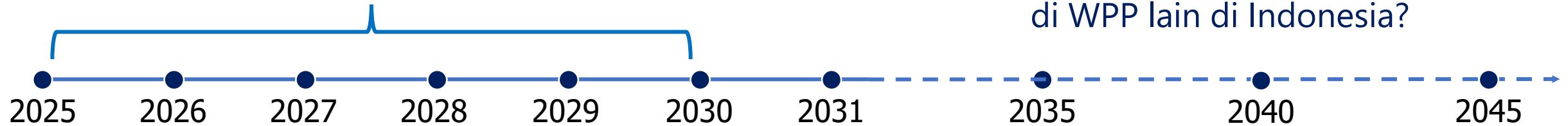
# RENCANA TINDAK LANJUT

- Implementasi Program Blue Halo S di WPP 572 berlangsung selama  $\pm 6$  tahun (2025 – 2030)
- Potensi replikasi program di WPP lain hingga tahun 2045



Pilot Program Blue Halo S di  
WPP 572


Replikasi Program Blue Halo S  
di WPP lain di Indonesia?





# TERIMA KASIH


## Konservasi Indonesia


Gedung Graha Inti Fauzi Lt. 9  
Jl. Hj. Tutty Alawiyah No. 22, RT.02/RW.07, Pejaten Barat, Pasar Minggu,  
Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12510


 (021)-7883 8626

 [konservasi-id.org](http://konservasi-id.org)

 @konservasi\_ind

 @konservasiid

 Konservasi Indonesia

 Konservasi Indonesia